

**LAPORAN KINERJA
(LAKIN)**

TAHUN 2024



**Nomor : LAP-5/KPP.0510/2025
Tanggal : 30 Januari 2025**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
KEBON JERUK DUA**

Jalan KS. Tubun Nomor 10, Jakarta Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi setiap tahun yaitu setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) dapat berperan sebagai alat kendali serta pengukuran kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, juga berfungsi sebagai perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja semua unit operasional di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.

Bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Sonny Zulijanto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. SISTEMATIKA LAPORAN	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN KINERJA.....	11
B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	15
B. REALISASI ANGGARAN DAN PENCAPAIAN OUTPUT BELANJA.....	58
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN	61
A. LAPORAN NKO S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024	61
B. KONTRAK KINERJA PIMPINAN	62
C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA.....	78

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu komponen penerimaan dalam negeri yang harus ditingkatkan karena pajak adalah sumber penerimaan utama dalam pembiayaan anggaran dan pendapatan negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk terus meningkatkan kemandirian pembiayaan negara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mengemban tugas menghimpun penerimaan dari sektor perpajakan yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan negara. Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua adalah mencapai target penerimaan dengan memberikan pelayanan administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak dengan cara membangun hubungan yang didasari profesionalisme, keterbukaan dan sikap keramahan, baik dalam konteks pembinaan, pelayanan, maupun sosialisasi sehingga diharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan perubahan persepsi Wajib Pajak yang positif terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.

Penyusunan LAKIN dapat berperan sebagai alat kendali serta pengukuran kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, juga berfungsi sebagai perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja semua unit operasional di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.

Capaian kinerja dapat digambarkan melalui Indikator Kinerja Utama dimana merupakan ukuran keberhasilan yang dapat menggambarkan terwujudnya kinerja, hasil kegiatan, dan tercapainya program yang menjadi sasaran Kantor Pelayanan Pajak demi tercapainya target penerimaan pajak. Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang berhasil untuk memberikan gambaran kinerja utama di instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan untuk memberikan gambaran posisi

kinerja instansi pemerintah demi terwujudnya organisasi yang akuntabel serta menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik.

Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua memiliki target penerimaan sebesar Rp1.737.727.794.000,00 dan dengan segala upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua telah merealisasikan penerimaan sebesar Rp1.750.626.823.728,00 atau sama dengan sebesar 100.74% dari target yang ditetapkan.

Dalam rangka merealisasikan target penerimaan tersebut terdapat beberapa faktor pendukung baik dari pihak eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah partisipasi Wajib Pajak dan masyarakat mengenai kepatuhan dalam pembayaran pajak. Sedangkan faktor internal yang mendukung keberhasilan adalah sinergi yang baik antar pegawai dan antar seksi, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, penggalan potensi Wajib Pajak, kegiatan penegakan hukum serta kegiatan pendukung lainnya.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memotivasi, memberikan pedoman dan evaluasi untuk seluruh jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua guna mengatasi berbagai permasalahan yang akan dihadapi kedepannya dan terus memperbaiki kinerja untuk mewujudkan komitmen untuk dapat merealisasikan target penerimaan pajak selanjutnya yang ditetapkan pemerintah.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua berkomitmen akan meningkatkan pengawasan kepatuhan pada Wajib Pajak, meningkatkan realisasi pencairan tunggakan pajak, meningkatkan realisasi dan kualitas pemeriksaan pajak, melakukan upaya penyisiran pada wajib pajak yang belum terdaftar, melakukan upaya ekstensifikasi dan memanfaatkan data eksternal guna menggali potensi perpajakan sehingga diharapkan target penerimaan akan tercapai dengan terus meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua sesuai dengan mandat yang diberikan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penyusunan laporan ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi.

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, sebagai salah satu unit kerja strategis dalam lingkup DJP, dihadapkan pada berbagai permasalahan utama (*strategic issues*) yang memengaruhi pencapaian target kinerja. Beberapa di antaranya adalah:

1. Optimalisasi penerimaan pajak: Menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam segmen UMKM dan wajib pajak strategis.
2. Transformasi digital: Menyesuaikan proses bisnis dengan perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada wajib pajak.
3. Penguatan integritas dan kualitas SDM: Meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai untuk menghadapi dinamika peraturan perpajakan dan ekspektasi masyarakat.
4. Tantangan eksternal: Termasuk fluktuasi ekonomi akibat risiko ketegangan politik global yang dapat memengaruhi basis penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait capaian, kendala, dan rekomendasi strategis guna memastikan bahwa KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua tetap relevan dan adaptif dalam menjalankan tugas serta mendukung reformasi perpajakan nasional.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2007 Tanggal 31 Mei 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua merupakan wujud dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap sebagai pelaksanaan “*Good Governance*” dan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal DJP dengan penggabungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KP.PBB) dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) menjadi beberapa KPP Pratama dengan wilayah kerja tertentu. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua merupakan kantor pecahan dari KPP Jakarta Kebon Jeruk dan penggabungan sebagian wilayah kerja KP.PBB Jakarta Barat Satu serta Karikpa Jakarta Delapan dan Tujuh, yang meliputi wilayah kerja Kelurahan Duri Kepa, Kelurahan Kedoya Selatan dan Kelurahan Kedoya Utara.

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua mempunyai struktur organisasi, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Dalam kedudukannya tersebut, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2021 tentang Penetapan Perubahan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2021 sehingga mempunyai fungsi sebagai:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan;
3. Penjamin kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan;
4. Edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengolahan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau objek pajak;
5. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
6. Pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan;
7. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan;
8. Pemutakhiran basis data perpajakan;
9. Pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi *Onshore*, Pertambangan untuk Pengusaha Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya;
10. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
11. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
12. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
13. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

c. Struktur Organisasi

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua memiliki struktur organisasi berdasarkan SE-30/PJ/2021 tentang petunjuk penerapan reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

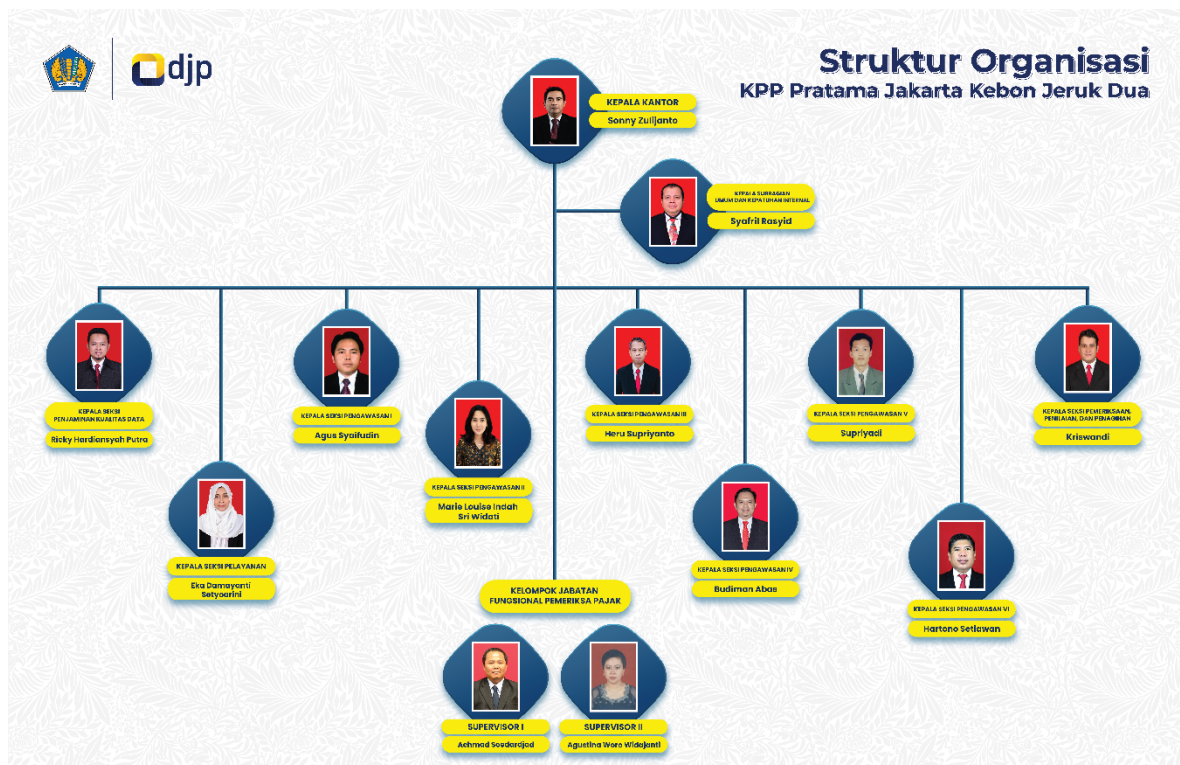
- a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko,

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- b) Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, serta melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya (khusus KPP Minyak dan Gas Bumi);
- c) Seksi Pelayanan, mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- d) Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI, mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal perairan lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya (khusus KPP Minyak dan Gas Bumi);

- e) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, melakukan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi areal lepas pantai (offshore) dan tubuh bumi serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya (khusus KPP Minyak dan Gas Bumi), serta melakukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan (khusus untuk KPP Badan dan Orang Asing);
- f) Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penyuluh Pajak, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua

Gambaran singkat pegawai pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua berdasarkan data SIKKA per Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai per Unit Organisasi

Unit Organisasi	Jumlah
Kepala Kantor	1
Seksi Pelayanan	16
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
Seksi Pengawasan I	12
Seksi Pengawasan II	4
Seksi Pengawasan III	4
Seksi Pengawasan IV	4
Seksi Pengawasan V	5
Seksi Pengawasan VI	4
Seksi Penjaminan Kualitas Data	4
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9
Fungsional Pemeriksa Pajak	14
Total	85

Sumber: Sistem informasi keuangan, kepegawaian & aktiva

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek terpenting dalam mendukung pencapaian target kinerja dan penerimaan kantor. SDM yang unggul menjadi kunci utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua pada

tahun 2024 berjumlah 85 pegawai. Berdasarkan KEP-212/PJ/2021 tentang Penetapan Standar Formasi Pegawai pada seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah tersebut masih kurang dari formasi ideal yaitu sebanyak 97 pegawai. Meskipun jumlah formasi pegawai saat ini belum ideal, namun seluruh pegawai tetap mampu bekerja dan saling bahu-membahu mencapai target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Komposisi Pegawai per Jabatan berdasarkan Jenis Kelamin

Jabatan	laki-laki	perempuan	Total
Kepala Kantor	1	-	1
Kepala Seksi/Subbag/Supervisor	8	2	10
Fungsional Pemeriksa	12	2	12
Fungsional Penyuluh	3	3	6
Account Representative	16	9	25
Pelaksana	11	18	29
Total	51	34	85

Sumber: Sistem informasi keuangan, kepegawaian & aktiva

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua masih didominasi oleh laki-laki dengan persentase 60% berbanding 40%. Persentase pegawai perempuan yang menduduki jabatan strategis ialah 29% dengan rincian 50% dari jabatan fungsional penyuluh, 36% dari jabatan *account representative*, 20% dari jabatan kepala seksi/subbag, dan 14 % dari jabatan fungsional pemeriksa pajak. Hal ini mencerminkan upaya organisasi untuk meningkatkan representasi gender dalam jabatan strategis

Tabel 3. Komposisi Pegawai per Jabatan berdasarkan Jenis Kelamin

Usia	laki-laki	perempuan	Total
<30	8	17	25
30 – 50	34	13	47
> 50	9	4	13
Total	51	34	85

Sumber: Sistem informasi keuangan, kepegawaian & aktiva

Berdasarkan kelompok usia, pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua didominasi oleh pegawai dengan rentang usia 30 s.d. 50. Pegawai dengan rentang usia <30 tahun didominasi oleh pegawai perempuan dengan persentase sebesar 68%. Berdasarkan data sistem informasi kepegawaian, pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon

Jeruk Dua terdiri dari pegawai yang berasal dari berbagai wilayah. Pegawai yang berasal dari berbagai latar belakang usia dan wilayah ini mencerminkan keberagaman organisasi dan mendukung inklusi sosial.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Organisasi	Tingkat Pendidikan					Total
	Tk. SMU/ Sederajat	Tk. Akademi (D1)	Tk. Akademi (D3)	Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	Tk. Pasca Sarjana (S2)	
KPP Pratama	-	-	-	-	1	1
Seksi Pelayanan	1	3	3	8	1	16
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	2	2	1	3	-	8
Seksi Pengawasan I	-	1	2	6	3	12
Seksi Pengawasan II	-	-	-	3	1	4
Seksi Pengawasan III	-	-	-	1	3	4
Seksi Pengawasan IV	-	-	-	3	1	4
Seksi Pengawasan V	-	1	-	4	-	5
Seksi Pengawasan VI	-	-	-	2	2	4
Seksi Penjaminan Kualitas Data	-	-	3	-	1	4
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-	1	4	3	1	9
Fungsional Pemeriksa Pajak	-	-	3	7	4	14
Total	3	8	16	40	18	85

Sumber: Sistem informasi keuangan, kepegawaian & aktiva

Berdasarkan tingkat pendidikannya, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua memiliki:

- 18 pegawai dengan tingkat pendidikan S2,
- 40 pegawai dengan tingkat pendidikan S1,
- 16 pegawai dengan tingkat pendidikan D3,
- 8 pegawai dengan tingkat pendidikan D1, dan
- 3 pegawai dengan tingkat pendidikan SMU/ sederajat.

Formasi pegawai dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah S1, yang tersebar di berbagai jabatan strategis seperti fungsional pemeriksa, fungsional penyuluh, kepala seksi, dan pelaksana.

SDM yang tersedia telah memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan administratif dan operasional kantor. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua senantiasa berkomitmen untuk membentuk pegawai yang profesional, berintegritas tinggi, loyal, dan bertanggung jawab atas tugas yang diemban.

Seiring dengan peningkatan target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, SDM yang tersedia diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam mendukung tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan pengelolaan SDM menjadi fokus utama untuk menjawab tantangan strategis yang dihadapi kantor.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur terkait capaian kinerja, analisis, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan. Adapun sistematika laporan ini terdiri atas:

1. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. Bab ini terdiri dari subbab:

- a. Latar Belakang;
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
- c. Sumber Daya Manusia; dan
- d. Sistematika Laporan.

2. Perencanaan Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai:

- a. Perencanaan strategis
- b. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024

3. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini, diuraikan hal-hal yang menjadi pertanggung-jawaban kinerja selama tahun 2024 yaitu:

- a. Capaian Kinerja Organisasi

- b. Realisasi Anggaran
 - c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - d. Kinerja Lain-lain
 - e. Evaluasi dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penutup
- Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
5. Lampiran
- Berisikan lampiran-lampiran yang mendukung laporan ini berupa:
- a. Perjanjian kinerja tahun 2024
 - b. Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024
 - c. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

a. Visi

Visi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua adalah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang menyelenggarakan perpajakan modern yang efektif dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Visi tersebut merefleksikan cita-cita KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya dengan tingkatan standar dunia atau standar internasional yang modern baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya sehingga mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

b. Misi

Misi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua adalah menghimpun penerimaan pajak untuk kemandirian APBN dengan layanan perpajakan yang efektif dan efisien, mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang *minimizing distortion* serta senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir.

c. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai lima tahun ke depan. Oleh karena itu sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara membangun hubungan yang didasari dengan profesionalisme, keterbukaan, dan sikap keramahan, baik dalam konteks pembinaan, pelayanan, sosialisasi sehingga diharapkan adanya penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan perubahan persepsi Wajib Pajak yang positif terhadap kinerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua.

d. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, sasaran strategis selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
3. Organisasi SDM yang optimal
4. Sistem Informasi yang andal dan terintegritas
5. Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah.

e. Kebijakan

Demi tercapainya dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk atau pegangan bagi setiap usaha kegiatan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua yakni:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Meningkatkan pencapaian rencana penerimaan PPh;
3. Meningkatkan pencapaian rencana penerimaan PPN dan PPnBM;

f. Program

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, maka dicanangkan program peningkatan dan pengamanan penerimaan perpajakan yang dapat dicapai dengan program-program sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana;
2. Pembenahan berkas Wajib Pajak;
3. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM serta pengelolaan keuangan;
4. Percepatan penyelesaian permohonan;
5. Intensifikasi PPh;
6. Ekstensifikasi PPh;
7. Penagihan PPh;
8. Pengawasan administrasi PPh;
9. Intensifikasi PPN dan PPn BM;
10. Ekstensifikasi PPN dan PPn BM;
11. Pengawasan administrasi PPN dan PPn BM;
12. Penagihan PPN dan PPn BM;

B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Sasaran strategis KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua yang tertuang dalam Penetapan Kinerja 2024 secara garis besar menunjukkan sebagian besar tercapainya target yang telah ditetapkan.

1. Sasaran Strategis: (Penerimaan Pajak Negara yang Optimal), target Persentase realisasi penerimaan pajak ditetapkan sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 100,74%. Target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ditetapkan sebesar 100,00 dengan realisasi sebesar 105.
2. Sasaran Strategis: (Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi), target persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditetapkan sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 105,74%. Target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) ditetapkan sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 100,78%.
3. Sasaran Strategis: (Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi), target persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) ditetapkan target sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 100,35%.
4. Sasaran Strategis: (Edukasi dan Pelayanan yang Efektif), target persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan ditetapkan target sebesar 74,00% dengan realisasi sebesar 88,80%. Target indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 109,76.
5. Sasaran Strategis: (Pengawasan pembayaran masa yang Efektif), target persentase pengawasan pembayaran masa ditetapkan sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 117,96%.
6. Sasaran Strategis: (Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif), target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ditetapkan sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 120,00%, target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 120,00%, target efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

7. Sasaran Strategis: (Penegakan Hukum yang Efektif), target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 120%. Target efektivitas penagihan ditetapkan sebesar 75% dan terealisasi 95,66%. Target persentase persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ditetapkan sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100%.
8. Sasaran Strategis: (Data dan Informasi yang Berkualitas), target persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan ditetapkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 120,00%.
9. Sasaran Strategis: (Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif), target tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi sebesar 117,36, target Indeks Penilaian Integritas Unit ditargetkan sebesar 85 dan terealisasi sebesar 93,70. Indeks Efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko mempunyai target sebesar 90 dan dapat terealisasi sebesar 95,86.
10. Sasaran Strategis: (Pengelolaan Keuangan yang akuntabel), Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mempunyai target setahun yaitu 100 dan tercapai sebesar 120.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2024 merupakan hasil implementasi dari rencana kerja yang telah dirumuskan dan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran. Subbab ini menyajikan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, baik dari aspek penerimaan pajak, kualitas pelayanan, maupun kegiatan operasional lainnya.

Melalui analisis capaian kinerja, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam mendukung tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini juga menjadi acuan untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan pada periode berikutnya.

I. Perbandingan antara Target Awal tahun dengan realisasi 2024, dan perbandingan antara realisasi IKU dengan realisasi kinerja 5 tahun sebelumnya

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	35,03%	63,47%	63,47%	72,76%	72,76%	100,74%	100,74%
Capaian	120	120	120	94,49	94,49	100,74	100,74

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	94,23%	92,39%	119,06%	103,71%	100,74%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Realisasi Capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar 100,74% atau melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dilihat secara tren 5 tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak tidak tercapai pada tahun 2020-2021, yang disebabkan penurunan aktivitas ekonomi, dan kemampuan WP akibat pandemi covid-19 menjadi faktor utama belum tercapainya target penerimaan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi dan keberhasilan program pengungkapan sukarela (PPS) mendukung capaian realisasi penerimaan pajak yang signifikan di tahun 2022. Pada tahun 2023, capaian realisasi penerimaan konsisten melampaui target, karena didorong oleh optimalisasi teknologi digital, kepatuhan sukarela yang meningkat, dan kondisi ekonomi nasional yang stabil. Kinerja positif berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian realisasi penerimaan tetap diatas target, didukung oleh strategi penggalian potensi pajak sektoral, edukasi WP, dan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja penerimaan secara periodik yang melibatkan semua unsur baik dari unsur pemeriksaan, penyuluhan, penilaian, maupun pengawasan.

IKU Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	110	105	105	105	105	105	105
Capaian	110	105	105	105	105	105	105

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)
Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) = $\left(\frac{\text{Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}}{100\%} \right) \times 100$
Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas (maks. 120) = $\left(\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n} \right) \times 100$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:	
$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$	
Komponen pertumbuhan nasional =	
$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$	
Komponen pertumbuhan unit kerja =	
$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$	
Catatan	
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:	
$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$	

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		
Deviasi bulan =	Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas	X100%
	Proyeksi penerimaan kas	
Deviasi triwulan =	Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)	
	3	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	Σ Deviasi triwulan n (tn)	
	n	

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (2023)	-	-	-	108,25%	105%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh efektivitas pengawasan dan penggalan potensi pajak dari sektor strategis, serta proyeksi perencanaan kas yang cukup akurat dengan melakukan penghitungan proyeksi penerimaan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan potential loss dan potential gain terhadap WP tertentu dan penggalan potensi yang dilakukan.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	34,72%	65,29%	65,29%	75,34%	75,34%	100,78%	100,78%
Capaian	120	120	120	97,84	97,84	100,78	100,78

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	91,16%	155,25%	102,12%	100,78%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada 2024 mencapai 100,78%, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan upaya konsisten dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pembayaran dan pelaporan, optimalisasi pengawasan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP dan proses pengelolaan risiko kepatuhan yang dilakukan secara terstruktur dan objektif. Keberhasilan ini juga didukung dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, hasil dari edukasi yang berkelanjutan.

Dilihat secara tren, dari 2021 hingga 2024, terdapat fluktuasi yang signifikan. Realisasi 2021 hanya mencapai 91,16%, mencerminkan tantangan di masa pandemi yang memengaruhi kemampuan wajib pajak. Namun pada tahun 2022 s.d. tahun 2024 target IKU selalu tercapai, hal ini mencerminkan konsistensi kinerja dalam pengawasan dan perencanaan yang lebih akurat, dan didorong oleh kebijakan pemulihan ekonomi dan strategi intensif penggalan potensi.

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	93,64%	106,71%	106,71%	108,42%	108,42%	105,74%	105,74%
Capaian	120	120	120	120	120	105,74	105,74

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	69,32%	102,02%	126,68%	100,31%	105,74%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada 2024 mencapai 105,74%, menunjukkan keberhasilan dalam melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh berbagai inovasi dalam pelayanan, seperti penggunaan sistem elektronik yang semakin mudah diakses, kampanye kesadaran pelaporan SPT yang efektif, sosialisasi pelaporan SPT tepat waktu ke instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, dan aktif membagikan konten pengingat kewajiban pelaporan SPT melalui media sosial resmi. Selain itu, adanya penguatan pengawasan dan pendekatan berbasis data turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tren lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang positif. Selama empat tahun terakhir, Pada tahun 2020, realisasi IKU tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan merebaknya Covid-19 yang memengaruhi kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, realisasi IKU selali mencapai target. Tren ini mencerminkan keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dalam mempertahankan tingkat kepatuhan yang tinggi, sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi dan edukasi pajak berperan besar dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	42,07%	45,12%	45,12%	49,99%	49,99%	100,35%	100,35%
Capaian	120,00	90,24	90,24	66,65	66,65	100,35	100,35

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	109,71%	101,19%	120,00%	100,35%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada 2024 mencapai 100,35%, menunjukkan pencapaian target yang baik dan akurasi dalam perencanaan serta pelaksanaan pengawasan material. Realisasi ini didukung oleh pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan data perpajakan yang lebih optimal, serta peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan pengujian yang lebih efektif dan efisien. Hasil ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjaga kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor strategis.

Secara tren, kinerja dari 2021 hingga 2024 menunjukkan capaian positif dengan selalu tercapainya target. Pada 2021, realisasi mencapai 109,71%, yang mencerminkan fokus awal pada pengawasan material pascapandemi. Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan ke 101,19%, namun tetap melampaui target. Lonjakan signifikan terjadi pada 2023 dengan realisasi 120,00%, didorong oleh penguatan integrasi data dan intensifikasi pengawasan. Pada 2024, capaian tetap stabil melewati target di 100,35%, menunjukkan konsistensi dalam penerapan strategi dan mitigasi risiko Pengujian Kepatuhan Material.

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	27,41%	67,93%	67,93%	86,03%	86,03%	88,80%	88,80%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan

penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	80,40%	79,40%	84,00%	88,80%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada 2024 mencapai 88,80%, jauh melampaui target sebesar 74%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Pendekatan yang lebih personal melalui kampanye digital, pemanfaatan media sosial, serta penyuluhan secara sektoral berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, inovasi layanan seperti webinar pajak dan program *tax goes to school* turut berkontribusi pada pencapaian ini.

Tren 2021-2024 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Pada 2021 dan 2022, capaian berada di 80,40% dan 79,40%, mencerminkan dampak awal pemulihan ekonomi pascapandemi serta penyesuaian metode edukasi. Tahun 2023 mencatat peningkatan menjadi 84%, didorong oleh integrasi teknologi dalam kegiatan penyuluhan. Pada 2024, peningkatan lebih lanjut hingga 88,80% menandakan strategi edukasi yang semakin efektif. Tren ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan penyuluhan memainkan peran penting dalam mengubah perilaku wajib pajak secara berkelanjutan, dengan dampak positif yang semakin terlihat setiap tahunnya.

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	5%	15%	15%	85%	100%

Realisasi	6,25%	12,56%	12,56%	18,00%	18,00%	109,76%	109,76%
Capaian	120	120	120	120	120	120	109,76

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan, dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

$$IKU\ EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	109,76

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 mencapai 109,76, menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi dan melampaui ekspektasi wajib pajak terkait kualitas pelayanan dan penyuluhan yang diberikan. Angka ini mencerminkan kepuasan cukup tinggi terhadap layanan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, hasil dari berbagai upaya inovasi, seperti digitalisasi proses layanan oleh kantor pusat DJP, penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan aksesibilitas informasi pajak.

Efektivitas penyuluhan juga meningkat berkat pendekatan yang lebih strategis, termasuk pemanfaatan teknologi untuk memberikan penyuluhan interaktif, kampanye sadar pajak yang relevan, dan program edukasi berbasis kebutuhan wajib pajak. Capaian ini mengindikasikan keberhasilan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dalam membangun kepercayaan dan hubungan positif dengan wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan sukarela serta citra institusi yang lebih baik.

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	102,06%	102,06%	112,18%	112,18%	117,96%	117,96%
Capaian	120	113,40	113,40	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan

sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

c. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \\ \text{pengawasan} &= \left((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%) \right) \times 40\% + \\ \text{pembayaran masa} &= \left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right) \\ \text{Wajib Pajak Lainnya} & \\ \text{(Berdasarkan)} & \\ \text{Kewilayahan)} & \end{aligned}$$

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	99,05%	112,68%	107,96%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Persentase pengawasan pembayaran masa pada 2024 mencapai 107,96%, menunjukkan keberhasilan dalam melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pengawasan yang berbasis data dan risiko, di mana pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua semakin mengoptimalkan teknologi dalam memantau dan memastikan pembayaran pajak tepat waktu. Selain itu, komunikasi aktif dengan wajib pajak melalui pengingat dan edukasi mengenai kewajiban pembayaran turut berkontribusi terhadap hasil yang positif.

Secara tren, capaian dari 2021 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tahun 2021 mencatat realisasi 100%, menandakan kinerja yang sudah sesuai target meski dalam kondisi pemulihan ekonomi. Pada 2022, realisasi sedikit menurun ke 99,05%, akibat penyesuaian ekonomi pascapandemi. Namun, capaian realisasi Kembali mencapai target pada 2023 dengan realisasi 112,68%, dan tahun 2024 dengan capaian 107,96%. Hal ini didukung oleh pengawasan intensif dan penggalan potensi pajak yang lebih optimal serta mencerminkan keberlanjutan upaya KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dalam memperkuat pengawasan, mendorong kepatuhan, dan memastikan penerimaan yang stabil dari pembayaran masa.

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	106,99%	106,99%	111,23%	111,23%	120%	120%
Capaian	N/A	106,99	106,99	111,23	111,23	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka

himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara kualitas	

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	119,99%	112,30%	120,00%	120,00%	120,00%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dari 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat konsisten dan positif, dengan capaian selalu melebihi target. Pada 2024, capaian mencapai 120,00%, menegaskan keberlanjutan performa yang tinggi dalam menyelesaikan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada

Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Capaian ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian penerbitan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan, bukan hanya secara kuantitas maupun secara kualitas untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119,41%	109,45%	109,45%	115,79%	115,79%	120%	120%
Capaian	119,41	109,45	109,45	115,79	115,79	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Sedangkan pemanfaatan data matching ialah pemanfaata data pemicu dan data matching Wajib Pajak selain tahun berjalan yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

c. Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$

Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	-	120,00%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada 2024 mencapai 120,00%, menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam menindaklanjuti data STP, data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan . Capaian ini mencerminkan kemampuan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua untuk mengakses, menganalisis, dan memanfaatkan data STP, data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan dalam meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi potensi penerimaan.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	104,60%	104,60%	118,85%	118,85%
Capaian	120	120	120	104,60	104,60	118,85	118,85

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	118,85%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Persentase efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu pada 2024 mencapai 118,85%, menunjukkan bahwa KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua berhasil melampaui target dalam pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penyiapan bahan baku pemeriksaan untuk mendukung target pengujian kepatuhan Material.

memaksimalkan penggunaan data historis dan data non-tahun berjalan. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam memanfaatkan berbagai sumber data yang ada, baik yang berasal dari periode sebelumnya maupun data eksternal, untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Penggunaan data historis ini tidak hanya meningkatkan akurasi dalam pengawasan dan perencanaan pajak, tetapi juga memungkinkan identifikasi potensi wajib pajak dan analisis tren yang lebih mendalam.

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- 1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	72	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

- a. Deskripsi sasaran strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Sedangkan Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%); dan
B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%).

- c. Formula IKU

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$
<i>*) Capaian maksimal 120%</i>

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:
$(\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%) + (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%)$
<i>Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%</i>

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$
Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- 2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120,00%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada 2024 mencapai 120%, menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi dan Efektivitas kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu sehingga mendukung capaian penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua

IKU Tingkat efektivitas penagihan

- 1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	30,36%	42,13%	42,13%	71,30%	71,30%	95,66%	95,66%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

- a. Deskripsi sasaran strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak

- b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c. Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	80,99%	95,66%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 mencapai 95,66%, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 yaitu 80,99%. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan dalam strategi penagihan. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak telah dilaksanakan dengan jangka waktu sesuai ketentuan yang berlaku dengan didukung pemanfaatan

data yang lebih akurat untuk menargetkan wajib pajak dengan risiko tunggakan tinggi serta bimbingan dan sinergi yang baik dengan kanwil dan Dit P2 KPDJP.

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0	0	0	120	120	100	100

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada 2024 mencapai 100%, yang menunjukkan pencapaian target secara penuh dan efisiensi dalam proses pengajuan usul pemeriksaan. Capaian ini mencerminkan bahwa semua usulan untuk pemeriksaan bukti permulaan yang diperlukan telah diproses dan disampaikan tepat waktu sesuai prosedur.

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	35,41%	64,02%	64,02%	114,05%	114,05%	120%	120%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Penyediaan data potensi perpajakan ialah penyediaan Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

c. Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada 2024 mencapai 120%, yang mencerminkan pencapaian yang sangat baik dalam melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan laporan pengamatan dan penyediaan data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak yang belum tereksplorasi secara optimal. Dengan mengoptimalkan kemampuan pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dalam melakukan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi serta pemanfaatan sistem informasi dari Kantor Pusat DJP, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua mampu menyediakan data yang lebih akurat dan relevan, mendukung pengawasan yang lebih efisien, dan meningkatkan pengelolaan potensi pajak di masa depan.

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104	104	104	120	120	117,36	117,36
Capaian	104	104	104	120	120	117,36	117,36

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

b. Definisi IKU

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Komponen Kualitas Kompetensi

Komponen Kualitas Kompetensi terdiri dari 3 aspek yaitu aspek Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya, aspek Kualitas kompetensi pelaksana dan

fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya dan aspek Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

2) Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%}} \times 70\%$
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$ ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120		
Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,36

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada 2024 mencapai 117,36, yang menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas kompetensi dan pengelolaan SDM di lingkungan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Capaian ini mencerminkan bahwa program pelatihan, pengembangan, dan evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian pegawai telah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini mendukung peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugas perpajakan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

Peningkatan ini juga menandakan keberhasilan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kebintalan SDM, yang meliputi pembekalan terhadap pegawai dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta peningkatan kemampuan manajerial dan teknis. Dengan capaian 117,36, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan SDM yang berkualitas, yang tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga memperkuat profesionalisme dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan dalam sistem perpajakan.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	-	-	-	85
Realisasi	-	-	-	-	-	-	93,70
Capaian	-	-	-	-	-	-	110,23

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan

2. pengawasan kepatuhan

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya

3. pemeriksaan perpajakan

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak

4. penagihan pajak

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

1. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
2. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
3. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
4. Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

c. Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- 2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	91,2	96,38	96,58	93,70

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Indeks Penilaian Integritas Unit pada 2024 mencapai 93,70, mencerminkan komitmen kuat dari unit dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Secara keseluruhan, tren peningkatan dari 91,2 pada 2021 hingga 93,70 pada 2024 menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek integritas di unit tersebut. Pencapaian yang konsisten ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat budaya integritas, seperti pelatihan etika, penguatan sistem pengawasan internal, dan peningkatan sistem pelaporan, telah membuahkan hasil. Ke depannya, fokus pada menjaga dan meningkatkan integritas ini sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang profesional dan dapat dipercaya.

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

- 1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	35,67	56,00	56,00	82,12	82,12	95,86	95,86
Capaian	120	119,15	119,15	117,31	117,31	106,51	106,51

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ruang lingkup manajemen kinerja mencakup klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas dua aspek, yaitu manajemen kinerja organisasi dan manajemen kinerja pegawai. Manajemen kinerja organisasi berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, sedangkan manajemen kinerja pegawai mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lain sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana

tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko			
Indeks Implementasi Manajemen Risiko:			
Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko			x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko			
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			
Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:			
Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	26	21
Total		50	45

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	95,38	98,96	100	95,86

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada 2024 mencapai 95,86 dari target sebesar 90, menunjukkan hasil yang sangat baik. Secara keseluruhan, tren positif dari 95,38 pada 2021 hingga 95,86 pada 2024 menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam penerapan manajemen kinerja dan risiko yang terukur dan sistematis. Peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan risiko serta penetapan indikator kinerja yang lebih relevan telah mendukung kinerja yang lebih optimal dan pemenuhan target organisasi. Capaian ini mencerminkan

kedewasaan organisasi dalam menghadapi tantangan dan menjaga stabilitas serta keberlanjutan kinerja dalam setiap langkah yang diambil.

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1) Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104,22	104,22	104,22	120	120	120	120
Capaian	104,22	104,22	104,22	120	120	120	120

Narasi:

a. Deskripsi sasaran strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

c. Formula IKU

Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	96,39	94,11	98,77	120

Sumber: Laporan Kinerja 2023, Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan Aplikasi Mandor

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada 2024 mencapai 120, yang menunjukkan pencapaian luar biasa dan melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran pada tahun ini telah dilakukan dengan sangat efisien dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, termasuk dalam pengelolaan dan pengalokasian dana yang tepat. Peningkatan signifikan dari 98,77 pada 2023 menjadi 120 pada 2024 menunjukkan adanya peningkatan dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran, yang mendukung tercapainya hasil yang lebih optimal.

Pencapaian 120 ini juga mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Hal ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan stakeholders terhadap pengelolaan anggaran serta memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran, organisasi mampu lebih tepat sasaran dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, serta mencapai hasil yang lebih maksimal dengan pembiayaan yang ada

II. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- 1) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP
- b. Penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*
- c. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha
- e. Meningkatkan produktivitas dan success rate atas penerbitan SP2DK di Approweb
- f. Melakukan Analisa peringkat pembayaran wajib pajak berdasarkan penerimaan, melakukan mapping potensi pajak sebagai alat pengawasan, melakukan pemutakhiran profil Wajib Pajak dan menetapkan skala prioritas pengawasan dan penggalian potensi dalam rangka penguatan database pengawasan Wajib Pajak dengan
- g. Melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada, khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi, serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya
- h. Mengadakan IHT/Pelatihan mengenai penggalian potensi pajak, cara analisis dan pemanfaatan data dalam penggalian potensi, dan/atau *communication skill* atau negotiation skill terhadap Wajib Pajak secara rutin
- i. Melakukan rapat pembahasan bulanan terkait prognosa penerimaan restitusi
- j. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel komunikasi/ media massa/media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya).

2) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan atau kegagalan kinerja dapat dilihat dengan pengukuran kinerja yang merupakan proses yang sistematis dalam menilai hasil akhir pencapaian dari kegiatan organisasi sesuai dengan program, kebijakan, demi tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi untuk menghimpun pajak demi merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (%)
2020	1.865.894.491.000	1.758.314.539.223	-	94,23
2021	1.414.480.300.000	1.306.893.539.688	-24,19	92,39
2022	1.452.232.065.000	1.729.064.415.644	+2,67	119,06
2023	1.196.770.388.000	1.241.122.541.105	-17,59	103,71
2024	1.737.727.794.000	1.750.626.823.728	+45	100,74

Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2023 dan aplikasi Mandor

Tahun 2024 untuk ketiga kalinya dalam 5 tahun terakhir KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua membukukan realisasi sebesar 100,74%. Tercapainya target kinerja tersebut secara makro didukung oleh kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan, melakukan pengawasan berbasis risiko, membentuk komite kepatuhan, memberikan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pajak, dan juga memperluas informasi dan intensifikasi, terutama dengan sektor-sektor tertentu penyumbang penerimaan terbesar.

Selain faktor makroekonomi dan kebijakan, eksekusi yang dilakukan oleh pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dalam melakukan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan terhadap Wajib Pajak merupakan faktor utama tercapainya target kinerja maupun target penerimaan kantor. Tekad dan komitmen KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua adalah untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi untuk

mencapai target kinerja dan penerimaan yang optimal, dengan didukung seluruh komponen yang terlibat dalam lingkungan kantor yang merujuk pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diantaranya adalah integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kelima komponen tersebut merupakan komitmen Kami untuk menunjang dan merealisasikan penerimaan pajak yang telah ditetapkan

3) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi jumlah SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- c. Optimalisasi penggunaan mobil dinas yang tersedia untuk menunjang kegiatan kantor serta melakukan pengawasan ketat terhadap pemeliharaan untuk memastikan usia pakai kendaraan tetap optimal

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengawasan untuk baham baku pemeriksaan, yang dilakukan secara berkala dalam rapat komite kepatuhan sehingga kegiatan pemeriksaan yang dilakukan lebih terarah,

dan meningkatkan capaian pengujian kepatuhan material.

- d. Melakukan penguatan *database* pengawasan Wajib Pajak dengan melakukan Analisa peringkat pembayaran wajib pajak berdasarkan penerimaan, melakukan *mapping* potensi pajak sebagai alat pengawasan, melakukan pemutakhiran profil Wajib Pajak dan menetapkan skala prioritas pengawasan dan penggalian potensi
 - e. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai kewajiban pelaporan SPT Tahunan
- 5) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Berdasarkan analisis risiko yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, terdapat beberapa kejadian risiko yang dilakukan mitigasi, yaitu:

- a. Kejadian Risiko: Penerimaan pajak hasil dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak tercapai secara optimal.

Rencana aksi atas kejadian risiko tersebut adalah menyediakan data potensi perpajakan, mengoptimalkan pengawasan wilayah oleh AR dengan meningkatkan kunjungan kerja ke Wajib Pajak, dan membuat prognosa penerimaan dan restitusi tiap bulan. Dengan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan, besaran risiko telah turun dari 23 menjadi 6.

- b. Kejadian Risiko: Penerimaan pajak hasil dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tidak tercapai secara optimal.

Rencana aksi atas kejadian risiko tersebut adalah Melakukan coaching dari atasan kepada AR yang belum sepenuhnya menjalankan strategi pengamanan penerimaan pajak yang ditetapkan, mengadakan IHT/Pelatihan mengenai penggalian potensi pajak, cara analisis dan pemanfaatan data dalam penggalian potensi, dan/atau *communication skill* atau *negotiation skill* terhadap Wajib Pajak, meningkatkan kualitas analisis data Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan, besaran risiko telah turun dari 20 menjadi 1.

- c. Kejadian Risiko: Penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak tidak tercapai secara optimal.

Rencana aksi atas kejadian risiko tersebut adalah melakukan rapat pembahasan bulanan terkait prognosa restitusi, dan melakukan rapat

pembahasan penetapan DSPP/DPP/DSPC/DSPT/DSPE. Dengan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan, besaran risiko telah turun dari 13 menjadi 2.

- d. Kejadian Risiko: Kegiatan pengawasan belum dilaksanakan dengan optimal.

Rencana aksi atas kejadian risiko tersebut adalah Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing, melakukan visit secara terencana dan sesuai dengan permasalahan yang ada khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak merespon himbauan SP2DK dan sulit dihubungi, evaluasi penerimaan berdasarkan segmentasi usaha. Dengan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan, besaran risiko telah turun dari 13 menjadi 2.

- e. Kejadian Risiko: Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum.

Rencana aksi atas kejadian risiko tersebut adalah Menyelenggarakan sosialisasi yang bertema anti korupsi melalui kegiatan Morning Activity/IHT/ICV maupun penerbitan imbauan, melakukan pemantuan kepatuhan pegawai kepada Wajib Pajak. Dengan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan, besaran risiko telah turun dari 13 menjadi 1.

- f. Kejadian Risiko: Rendahnya efisiensi pelaksanaan anggaran.

Rencana aksi atas kejadian risiko tersebut adalah melakukan pemantauan internal melalui pelaksanaan pemantauan social media maupun pelaksanaan Inspeksi mendadak (Sidak). Dengan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan, besaran risiko telah turun dari 20 menjadi 10

- g. Kejadian Risiko: Rendahnya efisiensi pelaksanaan anggaran.

Rencana aksi atas kejadian risiko tersebut adalah memaksimalkan efisiensi anggaran sesuai target IKU, membuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan efisiensi anggaran. Dengan mitigasi risiko yang telah dilaksanakan, besaran risiko telah turun dari 14 menjadi 6

- 6) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian Realisasi kinerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua tahun ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi ialah

- a. Kondisi ekonomi yang kurang stabil akibat risiko konflik geopolitik dan kebijakan moneter global. Oleh karena itu KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua melakukan Langkah-langkah seperti melakukan pengawasan intensif Wajib Pajak Prioritas dengan melakukan analisis data berbasis risiko, melakukan rapat komite kepatuhan secara berkala, menyusun daftar sasaran prioritas penerimaan pajak yang efektif.
 - b. Meningkatnya ekonomi informal sebagai konsekuensi dari perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua melakukan edukasi khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memahami kewajiban perpajakan mereka dalam ekonomi digital.
 - c. Peningkatan restitusi pajak. Peningkatan restitusi pajak menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait permohonan restitusi pajak untuk menyesuaikan strategi pengawasan dan intensifikasi pajak
- 7) Analisis akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Pajak menjadi sumber utama untuk mendanai program pemerintah yang berfokus pada pengurangan ketidaksetaraan gender, seperti pelatihan kerja bagi perempuan, program pemberdayaan ekonomi berbasis gender, dan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan.
- b. Dana pajak dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang inklusif, seperti jalur khusus, lift dengan akses kursi roda, dan fasilitas umum lainnya yang ramah bagi penyandang disabilitas. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas atau menjalankan program

inklusi sosial, sehingga mendorong lebih banyak partisipasi mereka dalam dunia kerja

- c. Pajak dapat digunakan untuk mendanai program jaring pengaman sosial, seperti bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan gratis, yang ditujukan untuk kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Redistribusi ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan inklusi bagi kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian
- 8) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pencegahan *stunting*, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

III. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun rencana pengawasan Wajib Pajak per jenis pajak dan per sektor; • Melaksanakan Rapat pembinaan dan rapat komite kepatuhan secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan mitigasi risiko; • Monitoring dan evaluasi atas kinerja penerimaan secara periodik • Optimalisasi Kegiatan pengawasan pembayaran masa dan pengujian kepatuhan material; • Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai tata cara pengisian dan pelaporan serta mempublikasikan diberbagai media online ataupun cetak mengenai batas pelaporan SPT Tahunan.	2025

B. REALISASI ANGGARAN DAN PENCAPAIAN OUTPUT BELANJA

Berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja tingkat satuan kerja, anggaran yang dikelola KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua pada tahun 2024 sebesar Rp6.368.463.000, turun 25% dibandingkan dengan Anggaran pada tahun lalu (dari Rp8.460.171.000 menjadi 6.368.463.000). Realisasi anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp6.368.463.000 atau 94,95% dari total anggaran yang tersedia, hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien karena meskipun dengan anggaran yang lebih kecil namun mayoritas kegiatan yang direncanakan tetap berhasil dilaksanakan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 090
SATUAN KERJA : 409411
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PAJAK
DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 21/01/25 5:19 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 21/1/25 2:51 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PECAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	732.336.000	647.064.000	608.005.000	0	608.005.000	93.96	39.059.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	732.336.000	647.064.000	608.005.000	0	608.005.000	93.96	39.059.000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	32.640.000	62.170.000	38.753.000	0	38.753.000	62.33	23.417.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	32.640.000	62.170.000	38.753.000	0	38.753.000	62.33	23.417.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	764.976.000	709.234.000	646.758.000	0	646.758.000	91.19	62.476.000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.528.023.000	1.542.103.000	1.512.469.472	0	1.512.469.472	98.08	29.633.528
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	202.774.000	222.000.000	204.717.000	0	204.717.000	92.21	17.283.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	83.256.000	83.256.000	62.256.000	0	62.256.000	74.78	21.000.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	193.284.000	232.992.000	222.270.222	0	222.270.222	95.4	10.721.778
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2.007.337.000	2.080.351.000	2.001.712.694	0	2.001.712.694	96.22	78.638.306
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	324.780.000	289.290.000	224.282.386	0	224.282.386	77.53	65.007.614
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	140.800.000	150.800.000	147.727.720	0	147.727.720	97.96	3.072.280
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	465.580.000	440.090.000	372.010.106	0	372.010.106	84.53	68.079.894
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	265.626.000	265.626.000	261.120.555	0	261.120.555	98.3	4.505.445
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	265.626.000	265.626.000	261.120.555	0	261.120.555	98.3	4.505.445
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	840.000.000	943.800.000	929.700.877	0	929.700.877	98.51	14.099.123
522112	Belanja Langganan Telepon	80.367.000	90.600.000	86.278.866	0	86.278.866	95.23	4.321.134
522113	Belanja Langganan Air	33.658.000	78.000.000	74.181.700	0	74.181.700	95.1	3.818.300
522141	Belanja Sewa	117.860.000	142.820.000	139.971.000	0	139.971.000	98.01	2.849.000
522151	Belanja Jasa Profesi	14.100.000	9.600.000	5.100.000	0	5.100.000	53.12	4.500.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1.085.985.000	1.284.820.000	1.235.232.443	0	1.235.232.443	97.66	29.587.557
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	477.229.000	554.305.000	552.181.325	0	552.181.325	99.62	2.123.675
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406.850.000	406.850.000	397.976.707	0	397.976.707	97.82	8.873.293
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000

<

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan aspek penting dalam optimalisasi kinerja organisasi. Upaya efisiensi dilakukan melalui pengelolaan anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia, serta optimalisasi aset dan teknologi informasi.

Dalam aspek anggaran, efisiensi belanja operasional berhasil diwujudkan melalui efisiensi belanja lembur pegawai sebesar 37,67% serta efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar 20,02%. Langkah-langkah ini dilakukan dengan mengoptimalkan jam kerja reguler serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan optimalisasi perencanaan kerja yang efektif sehingga mengurangi kebutuhan perjalanan dinas.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pegawai pada tahun 2024 sebanyak 85 orang, masih berada di bawah jumlah ideal berdasarkan KEP-244/PJ/2021 yang menetapkan kebutuhan pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua sebesar 97 orang. Meskipun terdapat kekurangan pegawai, efisiensi tetap dapat dicapai melalui penyesuaian beban kerja, pemanfaatan teknologi informasi dalam otomatisasi proses administratif, serta peningkatan kapasitas pegawai yang ada melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Pada aspek pemanfaatan aset, saat ini tersedia lima unit mobil dinas operasional dan satu unit mobil dinas jabatan yang dikelola secara optimal untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Efisiensi dalam pemanfaatan aset dilakukan dengan sistem penggunaan kendaraan dinas secara bersama sesuai dengan kebutuhan layanan, serta pengawasan ketat terhadap pemeliharaan untuk memastikan usia pakai kendaraan tetap optimal.

Upaya efisiensi yang telah dilakukan di berbagai aspek ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan berdaya guna dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.750.626.823.728 dari target sebesar 1.737.727.794.000 dan berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,36. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala yang terintegrasi dengan manajemen risiko, serta peran seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua merupakan faktor penting dalam pencapaian target kinerja dan target penerimaan pajak tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan penuh tanggung jawab, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik terhadap peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Sonny Zulijanto



LAMPIRAN

A. LAPORAN NKO S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT KPP KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2024								
Kode SG/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	VIC	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	102,54
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,54
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,74%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,74
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,00
Customer Perspective							20,00%	101,61
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,67
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,78%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,78
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,74%	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,74
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,35
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,35%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,35
Internal Process Perspective							25,00%	117,44
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,88
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,76%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,76
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,96%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,61
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,85%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,85
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penitatan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	95,66%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampalan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	115,68
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,36
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,36	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,36
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,70	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,23
9c-N	Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	95,86	Max	P/M	14,00%	33,33%	106,51
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,36

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

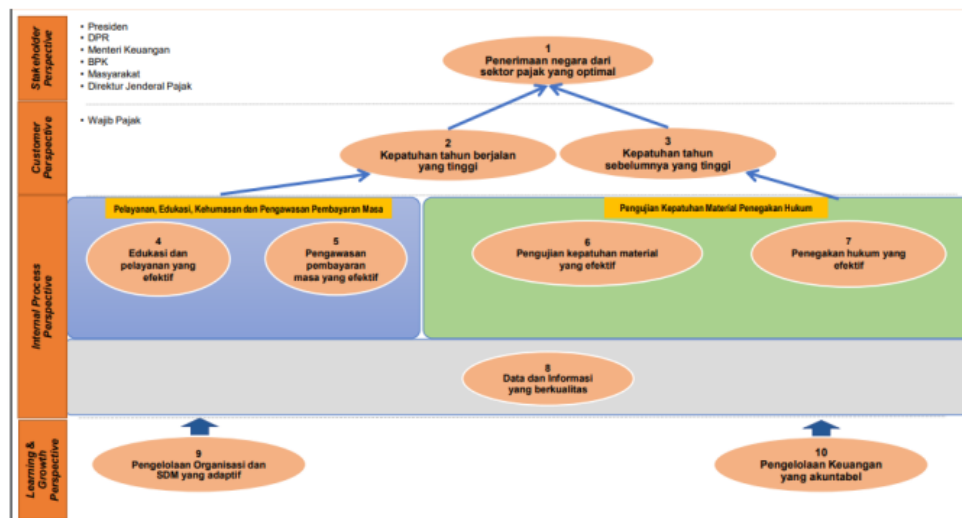
B. KONTRAK KINERJA PIMPINAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-9/WPJ.05/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
KEBON JERUK DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON
JERUK DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-IN Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-IN Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
A. Program Ekstensifikasi Penerimaan Negara		Rp	426.548.000
1.	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	Rp	146.129.000
2.	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	Rp	280.419.000
B. Program Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		Rp	306.180.000
1.	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	Rp	221.760.000
2.	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	Rp	84.420.000
C. Program Pengawasan dan Penegakan Hukum		Rp	321.446.000
1.	Dokumen Penagihan Aktif	Rp	82.577.000
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	Rp	61.442.000
3.	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	Rp	153.985.000
4.	Laporan Penilaian	Rp	23.442.000
D. Program Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		Rp	4.263.084.000
1.	Kerumahtanggaan	Rp	84.617.000
2.	Layanan Perkantoran	Rp	4.178.467.000

E. Program Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 764.976.000

1. Layanan Perkantoran

Rp 764.976.000

Total

Rp 6.082.234.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Suparno

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Kebon Jeruk Dua



Ditandatangani Secara Elektronik
Sonny Zulijanto

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON
JERUK DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kebon Jeruk Dua



Ditandatangani Secara Elektronik
Sonny Zulijanto

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi /Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Mengoptimalkan kegiatan pengawasan pembayaran masa	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak	Q1: 1. Menyediakan data potensi Perpajakan 2. Mengoptimalkan pengawasan oleh AR dengan meningkatkan kunjungan kerja ke Wajib Pajak 3. Membuat prognosa penerimaan dan restitusi tiap bulan	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa meningkat	Januari - Desember	Seksi Pengawasan I s.d. IV, Seksi Perjaminan Kualitas Data	
				Q2: 1. Menyediakan data potensi perpajakan 2. Mengoptimalkan pengawasan oleh AR dengan meningkatkan kunjungan kerja ke Wajib Pajak 3. Membuat prognosa penerimaan dan restitusi tiap bulan	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa meningkat			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: 1. Menyediakan data potensi perpajakan 2. Mengoptimalkan pengawasan oleh AR dengan meningkatkan kunjungan kerja ke Wajib Pajak 3. Membuat prognosa penerimaan dan restitusi tiap bulan	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa meningkat			
				Q4: 1. Menyediakan data potensi perpajakan 2. Mengoptimalkan pengawasan oleh AR dengan meningkatkan kunjungan kerja ke Wajib Pajak 3. Membuat prognosa penerimaan dan restitusi tiap bulan	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa meningkat			
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi/ Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT	Meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak baik	Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.	Q1: 1. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT	Januari - Desember	Seksi Pengawasan I s.d. IV, Seksi Pelayanan	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	secara offline maupun online		melalui berbagai channel komunikasi/ media massa/ media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya) 2. Mengingatkan Wajib Pajak, terkait batas waktu kewajiban, perpajakannya dengan cara, pengiriman email blast/ SMS blast/ WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak	Tahunan PPh Pajak Badan dan Orang Pribadi Meningkat			
				Q2: 1. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel komunikasi/ media massa/ media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya) 2. Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Pajak Badan dan Orang Pribadi Meningkat			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				perpajakannya dengan cara pengiriman email blast/ SMS blast/ WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak				
				Q3: 1. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui berbagai channel komunikasi/ media massa/ media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya) 2. Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara pengiriman email blast/ SMS blast/ WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Pajak Badan dan Orang Pribadi Meningkat			
				Q4: 1. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				berbagai channel komunikasi/ media massa/ media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya) 2. Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara pengiriman email blast/SMS blast/WA blast secara berkala kepada Wajib Pajak	Tahunan PPh Pajak Badan dan Orang Pribadi Meningkat			
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi / Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Mengoptimalkan kegiatan Pengujian Kepatuhan Material	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak	Q1: 1. Melakukan coaching dari atasan kepada AR yang belum sepenuhnya menjalankan strategi pengamanan penerimaan pajak yang ditetapkan 2. Mengadakan IHT/Pelatihan mengenai penggalian potensi pajak, cara analisis dan pemanfaatan data dalam penggalian potensi, dan/atau communication skill atau negotiation skill terhadap Wajib Pajak	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material meningkat	Januari - Desember	Seksi Pengawasan I.s.d. IV, Seksi Penjaminan Kualitas Data	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Meningkatkan kualitas analisis data Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan				
				Q2: 1. Melakukan coaching dari atasan kepada AR yang belum sepenuhnya menjalankan strategi pengamanan penerimaan pajak yang ditetapkan 2. Mengadakan IHT/Pelatihan mengenai penggalian potensi pajak, cara analisis dan pemanfaatan data dalam penggalian potensi, dan/atau communication skill atau negotiation skill terhadap Wajib Pajak 3. Meningkatkan kualitas analisis data Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material meningkat			
				Q3: 1. Melakukan coaching dari atasan kepada AR yang belum sepenuhnya menjalankan strategi	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				pengamanan penerimaan pajak yang ditetapkan 2. Mengadakan IHT/Pelatihan mengenai penggalian potensi pajak, cara analisis dan pemanfaatan data dalam penggalian potensi, dan/atau communication skill atau negotiation skill terhadap Wajib Pajak 3. Meningkatkan kualitas analisis data Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan	Kepatuhan Material meningkat			
				Q4: 1. Melakukan coaching dari atasan kepada AR yang belum sepenuhnya menjalankan strategi pengamanan penerimaan pajak yang ditetapkan 2. Mengadakan IHT/Pelatihan mengenai penggalian potensi pajak, cara analisis dan pemanfaatan data dalam penggalian potensi, dan/atau communication skill atau	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material meningkat			



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				negotiation skill terhadap Wajib Pajak 3. Meningkatkan kualitas analisis data Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan				
4	Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal/Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Mengoptimalkan pengelolaan keuangan	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran meningkat	Q1: 1. Memaksimalkan Efisiensi Anggaran sesuai target IKU 2. Membuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan efisiensi anggaran Q2: 1. Memaksimalkan Efisiensi Anggaran sesuai target IKU 2. Membuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan efisiensi anggaran Q3: 1. Memaksimalkan Efisiensi Anggaran sesuai target IKU 2. Membuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan efisiensi anggaran Q4:	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran meningkat Indeks kinerja pelaksanaan anggaran meningkat	Januari - Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	



No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				1. Memaksimalkan Anggaran sesuai target IKU 2. Membuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan efisiensi anggaran	anggaran meningkat			

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kebon Jeruk Dua



Ditandatangani Secara Elektronik
Sonny Zulijanto

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Sonny Zulijanto, S.H., M.M.	NAMA	Suparno	
NIP	196907121996031001	NIP	196805201995031003	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat)			
B. TAMBAHAN			

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Sonny Zulijanto
196907121996031001



Ditandatangani secara elektronik
Suparno
196805201995031003

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	86 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	26%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%

8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85



19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Sonny Zulijanto
196907121996031001



Ditandatangani secara elektronik
Suparno
196805201995031003



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-9A/WPJ.05/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-9/WPJ.05/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat,



Ditandatangani Secara Elektronik
Farid Bachtiar
NIP 196711171988101002

Jakarta, 23 September 2024
Kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sonny Zulijanto
NIP 196907121996031001

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang Dirilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sonny Zulijanto
NIP 196907121996031001

Jakarta, 23 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Farid Bachtiar
NIP 196711171988101002

C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024								
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 ESELON I : 04 WILAYAH/PROVINSI : 090 SATUAN KERJA : 409411 JENIS SATUAN KERJA : KD			KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN PAJAK DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA			Kode Lap : LRA.B.S.2 Tanggal : 21/01/25 5:19 PM Halaman : 1 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc Tgl Data : 21/1/25 2:51 PM		
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	732.336,000	647,064,000	608,005,000	0	608,005,000	93.96	39,059,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	732,336,000	647,064,000	608,005,000	0	608,005,000	93.96	39,059,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	32,640,000	62,170,000	38,753,000	0	38,753,000	62.33	23,417,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	32,640,000	62,170,000	38,753,000	0	38,753,000	62.33	23,417,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	764,976,000	709,234,000	646,758,000	0	646,758,000	91.19	62,476,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,528,023,000	1,542,103,000	1,512,469,472	0	1,512,469,472	98.08	29,633,528
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	202,774,000	222,000,000	204,717,000	0	204,717,000	92.21	17,283,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	83,256,000	83,256,000	62,256,000	0	62,256,000	74.78	21,000,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	193,284,000	232,992,000	222,270,222	0	222,270,222	95.4	10,721,778
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,007,337,000	2,080,351,000	2,001,712,694	0	2,001,712,694	96.22	78,638,306
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	324,780,000	289,290,000	224,282,386	0	224,282,386	77.53	65,007,614
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	140,800,000	150,800,000	147,727,720	0	147,727,720	97.96	3,072,280
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	465,580,000	440,090,000	372,010,106	0	372,010,106	84.53	68,079,894
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	265,626,000	265,626,000	261,120,555	0	261,120,555	98.3	4,505,445
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	265,626,000	265,626,000	261,120,555	0	261,120,555	98.3	4,505,445
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	840,000,000	943,800,000	929,700,877	0	929,700,877	98.51	14,099,123
522112	Belanja Langganan Telepon	80,367,000	90,600,000	86,278,866	0	86,278,866	95.23	4,321,134
522113	Belanja Langganan Air	33,658,000	78,000,000	74,181,700	0	74,181,700	95.1	3,818,300
522141	Belanja Sewa	117,860,000	142,820,000	139,971,000	0	139,971,000	98.01	2,849,000
522151	Belanja Jasa Profesi	14,100,000	9,600,000	5,100,000	0	5,100,000	53.12	4,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,085,985,000	1,264,820,000	1,235,232,443	0	1,235,232,443	97.66	29,587,557
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	477,229,000	554,305,000	552,181,325	0	552,181,325	99.62	2,123,675
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406,850,000	406,850,000	397,976,707	0	397,976,707	97.82	8,873,293
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024								
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 ESELON I : 04 WILAYAH/PROVINSI : 090 SATUAN KERJA : 409411 JENIS SATUAN KERJA : KD			KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN PAJAK DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA			Kode Lap : LRA.B.S.2 Tanggal : 21/01/25 5:19 PM Halaman : 2 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc Tgl Data : 21/1/25 2:51 PM		
KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	889,079,000	966,155,000	950,158,032	0	950,158,032	98.34	15,996,968
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	205,851,000	277,673,000	268,946,701	0	268,946,701	96.86	8,726,299
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	397,800,000	263,850,000	211,020,000	0	211,020,000	79.98	52,830,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	603,651,000	541,523,000	479,966,701	0	479,966,701	88.63	61,556,299
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,317,258,000	5,558,565,000	5,300,200,531	0	5,300,200,531	95.35	258,364,469
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	100,664,000	100,129,215	0	100,129,215	99.47	534,785
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	100,664,000	100,129,215	0	100,129,215	99.47	534,785
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	100,664,000	100,129,215	0	100,129,215	99.47	534,785
	JUMLAH BELANJA	6,082,234,000	6,368,463,000	6,047,087,746	0	6,047,087,746	94.95	321,375,254